

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhari, A. (2020). *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Amrani, H. (2019). *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B.N. (2016). *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Edisi Kedua)*. Jakarta: K E N C A N A
- Bagaskoro, dkk. (2023). *Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. Banten: Sadia Kurnia Pustaka.
- Christianto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Hamzah, A. (2013). *Terminologi Hukum Pidana Cet 3*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handoko. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Hasanal Mulkan, S. H. (2022). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media.
- Huda, H. M. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: CV Cendekia Press.
- Kaelan. (2017). *Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila sebagai Dasar Filsafat dan Ideologi Bangsa dan Negara*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maiyestati, M. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sumatera Barat: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Muladi, dkk. (2021). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Penerbit Alumni

- Munadi. (2017). *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum: Cetakan Kedelapan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ravena, H. D., & SH, M. (2017). *Kebijakan Kriminal: [Criminal Policy]*. Jakarta: Prenada Media.
- Sinyo. (2014). *Anakku Bertanya tentang LGBT*. Jakarta: Quanta.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tehupeiory, A. (2021). *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Uki Press.
- Tofik, D. T. Y. C. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Yasid, A. (2010). *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuleha. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

- Agustiawan, A. (2016). Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional). *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Arthani, N. L. G. Y. (2019). *Value Approach and Character Education in Reviewing Cohabitation Phenomenon*. *Sociological Jurisprudence Journal*, 2(2), 108-115.
- Brown, K. S., Schmidt, B., Morrow, C., & Rougeaux-Burnes, G. (2023). *Pre-Cohabitation Conversations for Relationships: Recommended Questions for Discussion*. *Contemporary family therapy*, 45(2), 131-145
- Danardana, A., & Setyawan, V. P. (2022). Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (*Samenlaven*) dalam Perspektif Hukum Pidana. *Justitia et Pax*, 38(1).
- Hairi, P. J. (2016). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 6(1), 1-15.
- Kartodinudjo, P. M. Y. (2023). Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perpektif Hukum Pidana. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1309-1324.
- Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 1-17.

- Mahardika, A. G. (2023). *Legal Politics Concerning The Fulfillment Of Lgbt Constitutional Rights In The Indonesian Legal Approach. Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak*, 4(1), 43-55.
- Mahendra, G. B., & Parwata, I. G. N. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8(06).
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(3).
- Sayulina, R., & Efendi, R. (2022). *The Criminal Law Reform On Completion Of Samenleven In Indonesia. AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 4(1), 42-53.
- Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). *Justisi*, 10(1), 174-188.
- Sulistiyono, B., & Purwadi, H. (2018). Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
- Susana, a. D., Abdillah, d. B., & Arifin, z. (2021). Criminalization and Decriminalization in The Draft Criminal Code. *Russian Law Journal*, 9(2).
- Rozi, Z. B. P. (2019). Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana. *Veritas et Justitia*, 5(2), 286-301.
- Tijow, L. M., Hasibuan, H., & Hayat, H. (2021). *The Urgency of Bajo Traditional Law as a Form of Law Enforcement Against the Performers of the Samenleven Delic. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(2), 256-266.
- Wibowo, D. V., & Simangunsong, F. (2023). Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Bagi Pelaku Pemerksaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2430-2438.
- Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (Lgbt): perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 132-146.
- Yemina, D., & Zain, R. N. (2022). Polemik Draf RKUHP: Ancaman Pidana Terhadap Pasangan Tanpa Nikah Check-In di Hotel *Polemic on Draft RKUHP: Criminal Threats Unmarried Couples Who Check-In at Hotels. people*, 3(2).
- Yudianto, O. (2016). Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 240055.

Karya Tulis Ilmiah

- Algifari, B. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kumpul Kebo (Cohabitation) Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Erfa, R. (2015). *Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Irwansyah, I., & Diana, L. (2016). *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Kusuma, G. I. (2016). *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Komunitas Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Delik-Delik Kesusilaan di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Lestari, S. B. (2012). *Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).
- Maulana, F. *Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi di Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Internet

- Ahdiat, A. (2022). Ini Negara yang Warganya Banyak Hidup Bersama tanpa Menikah. Tersedia pada: <https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2022/12/07/ini-negara-yang-warganya-banyak-hidup-bersama-tanpa-menikah> [Diakses tanggal 18 Agustus 2023].
- APA (American Psychological Association). (2015). *Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity in APA Documents*. Tersedia pada <https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf>. [Diakses tanggal 19 Agustus 2023].
- Edi, C. (2018). Alasan Berbeda Dua Pasangan Kumpul Kebo Lesbian, Digerebek Satpol PP di Karaoke dan Rusunawa. Tersedia pada: <https://jateng.tribunnews.com/2018/12/28/tanda-kiamat-alasan-pasangan-kumpul-kebo-lesbian-ini-bikin-ngelus-dada>. [Diakses tanggal 23 September 2023].
- Horowitz J., Graf N., & Livingston, G. (2019). *Marriage and cohabitation in the U.S. Pew Research Center*. Tersedia pada: <https://www.pewresearch.org/social-trends/2019/11/06/marriage-and-cohabitation-in-the-u-s/> [Diakses tanggal 23 September 2023].
- Nugroho, D. (2014). Dari Beristrikan Waria Hingga Punya Pasangan Kumpul Kebo. Tersedia pada: <https://suarabanyuurip.com/2014/05/06/dari-beristrikan-warja-hingga-punya-pasangan-kumpul-kebo>

beristrikan-waria-hingga-punya-pasangan-kumpul-kebo/ [Diakses tanggal 23 September 2023].

Suryarandika, R. (2023). KUHP Baru Dinilai tak Tegas Larang LGBT. Tersedia pada: <https://news.republika.co.id/berita/rovdu9502/kuhp-baru-dinilai-tak-tegas-larang-lgbt> [Diakses tanggal 21 Agustus 2023].

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam.

